KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Polri di bawah Presiden: reformasi diarahkan ke perbaikan kultural
Tanggal : Kamis, 04 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Polri Di Bawah Presiden

Reformasi Diarahkan Ke Perbaikan Kultural

ANGGOTA Komisi III DPR Rikwanto menilai, Polri sudah berada pada posisi yang tepat, secara konstitusional ada di bawah Presiden. Sehingga, pembenahan diarahkan pada aspek kultural agar pelayanan publik semakin kuat.

Dia menjelaskan, Polri merupakan subsistem dalam tata kelola negara. Karena itu, meski saling mempengaruhi dengan lembaga lain, institusi kepolisian tetap memiliki ruang independensi yang harus dijaga, karena Polri merupakan bagian dari sistem besar negara.

"Memang subsistem saling mempengaruhi, tapi tidak bisa menjadikan kondisi institusi lain sebagai alasan pembenaran," ujar Rikwanto dalam Rapat Panja Reformasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan dengan para ahli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Anggota Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, pola pembenaran semacam itu justru memunculkan persepsi bahwa Polri ikut terdampak karena lingkungan sistem yang belum ideal. Pandangan ini memang tidak sepenuhnya keliru, namun tidak boleh dijadikan dalih stagnasi reformasi.

Rikwanto menyoroti, TAP MPR telah jelas mengatur pemisahan TNI dan Polri, disertai amanat reformasi mencakup dimensi struktural, instrumental, dan kultural. "Terkait wacana reformasi radikal Polri, secara fungsi operasional sebenarnya sudah banyak perbaikan," katanya.

Dia memberi contoh, perubahan signifikan pada fungsi lalu lintas. Dulu, citra polisi lalu lintas berada di titik paling rendah dalam persepsi publik. Namun dengan berbagai inovasi, termasuk tilang elektronik dan pengurangan kontak langsung dengan masyarakat, persepsi terhadap Polantas perlahan membaik.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini berada pada sektor penegakan hukum khususnya reserse. Media sosial membuat dinamika opini publik bergerak cepat dan membuat setiap keluhan masyarakat mudah terekspos.

Namun, bukan berarti bahwa reserse tidak memiliki prestasi sama sekali. "Banyak capaian. Tapi persepsi publik hari ini dipengaruhi keluhan," jelas purnawirawan Polri bintang dua itu.

Dia berharap, pembenahan Polri dimulai dari kesadaran personal setiap anggota, bukan hanya regulasi atau instruksi. Di titik itu, fungsi polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus kembali menjadi identitas utama.

"Masih banyak polisi yang baik, dan itu harapan masyarakat. Sehingga saat masyarakat bertemu polisi, mereka akan merasa diayomi, dilindungi, dan dilayani," katanya.

SUMBER: IG PREIBADI

Rikwanto

Karena itu, perubahan radikal bukan soal struktur, melainkan penerapan reward and *punishment* secara konsisten, agar profesionalitas dapat terlihat jelas. Kata dia, perlu sanksi tegas untuk pelanggaran, tapi penghargaan bagi yang berprestasi harus diperkuat. Dengan demikian, yang baik terlihat dan yang melanggar tidak dibiarkan.

Sejalan dengan reward dan punishment, anggota Komisi III DPR Bimantoro Wiyono menilai, gaji aparat penegak hukum (APH) termasuk Polri relatif rendah. Negara-negara maju memberikan gaji tinggi pada APH karena mereka menekankan nilai-nilai seperti keadilan, profesionalisme, dan transparansi.

"Untuk menjaga integritas dan kualitas kerja aparat hukum, katanya, maka negara maju memberikan kompensasi finansial yang besar," kata Bimantoro.

Dia menyebut, gaji aparat penegak hukum saat ini tak sebanding dengan tuntutan besar yang dipikul mereka. Aparat penegak hukum kerap dituntut untuk bekerja adil dan profesional. Di saat yang sama, polisi kerap mendapatkan kritik masyarakat dan saat melakukan kesalahan kecil sering kali dibesar-besarkan.

"Untuk itu, kita harus memperhatikan nasib para anggota penegak hukum ini, mulai dari Polri, kejaksaan, hingga pengadilan," ucap legislator Fraksi Partai Gerindra itu.

Dia berharap, ke depan akan ada reward and punishment secara seimbang. Jika ada anggota yang terbukti berkinerja baik, negara harus hadir menjamin kesejahteraan mereka melalui reward. Sebaliknya, jika terbukti ada anggota yang melakukan tindakan tercela atau pidana, diberikan punishment yang berat.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menambahkan, agenda reformasi terhadap Polri harus dilakukan secara kultural, bukan struktural. Faktor utama yang mencederai citra institusi Korps Bhayangkara adalah perilaku para anggotanya, bukan karena kedudukan lembaga atau isu-isu lain yang berkaitan dengan struktur organisasi.

Kata dia, Polri berada di bawah presiden sudah diatur dalam Tap MPR Tahun 2000. Presiden Prabowo Subianto memegang amanat reformasi tersebut. "Aturan itu sangat ketat, karena evaluasi dari praktik sebelumnya, ketika kepolisian tidak berada di bawah langsung presiden," terang Habib.

Untuk menanggapi berbagai dinamika di masyarakat, sebelumnya Polri telah membentuk Tim Reformasi Internal. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan, tim ini dibentuk untuk menindaklanjuti aspirasi dan harapan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian.

"Polri terus mengikuti perkembangan yang ada dan menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat," ujar Listyo.

Sejak awal program transformasi, kata dia, Polri melakukan upaya perbaikan dari sisi operasional, instrumental, pengawasan, hingga hal-hal yang menjadi perhatian publik. Polri terbuka terhadap seluruh masukan, baik dari masyarakat umum, pakar, maupun lembaga terkait tugas kepolisian di bidang keamanan dan penegakan hukum.

"Perbaikan akan dilakukan menyeluruh, mulai dari aspek kultural, instrumental, hingga budaya organisasi," tegasnya. ■ PYB